



Volume 27 No 1, Januari 2025

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas

Analisis Faktor Determinasi Penanaman Modal Asing (PMA) Di Provinsi Gorontalo

Sitti Nurtina¹, Nur Rizky Putri Mahadi²

Hubungan Internasional, Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik, Universitas Bina
Mandiri Gorontalo¹

Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Mandiri Gorontalo²

email: sittinurtina92@ubmg.ac.id¹

putri.mahadi@ubmg.ac.id²

Abstract

Referring to the data on the realization of foreign investment (FDI) in 2022, it shows that Gorontalo is in position 32, when compared to other provinces on the island of Sulawesi, Gorontalo Province is in 4th place out of a total of 6 provinces. This shows that there are determinant factors that affect foreign investment in Gorontalo Province. The method used in this research is descriptive qualitative. The research location is at the Investment and One-Stop Integrated Service Office of Gorontalo Province. Data collection techniques used observation, interview, and documentation. Data sources consist of primary data and secondary data. The data analysis technique consists of data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study show: 1) Infrastructure is inadequate. Infrastructure limitations in Gorontalo Province such as roads, ports, transportation, and other inadequate supporting facilities hinder foreign investment. 2) Complicated regulations and policies. The licensing process, especially business licensing, directly affects the desire and decision of prospective entrepreneurs or investors to invest. However, the licensing process is lengthy and complex, which often makes foreign investors hesitant to invest. 3) Human resources; limited skilled and trained human resources (HR) can be an obstacle for foreign companies wishing to operate and is an important challenge for foreign investment in Gorontalo. 4) Competition with other regions; Gorontalo when compared to other regions in Sulawesi is still in the second to last position so other regions that are more advanced or offer more attractive incentives can attract foreign investors.

Keywords: *Foreign Direct Investment, Determinant, Macroeconomics, One Stop Integrated Service, Gorontalo*

Abstrak

Merujuk pada data realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) tahun 2022 menampilkan yaitu Gorontalo berada di posisi 32, bila dibandingkan dengan Provinsi lain yang ada di pulau Sulawesi, Provinsi Gorontalo berada di urutan 4 dari total 6 Provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor determinasi yang mempengaruhi penanaman modal asing di Provinsi Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang dilakukan

terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Infrastruktur belum memadai. Keterbatasan infrastruktur di Provinsi Gorontalo seperti jalan, pelabuhan, transportasi, dan fasilitas pendukung lainnya yang belum memadai menghambat investasi asing. 2) Regulasi dan kebijakan yang rumit. Proses perizinan, khususnya perizinan usaha secara langsung berpengaruh terhadap keinginan dan keputusan calon pengusaha atau investor untuk menanamkan modalnya. Namun, proses perizinan memakan waktu yang panjang dan kompleks, sehingga sering kali membuat investor asing ragu untuk berinvestasi. 3) Sumber daya manusia; keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan terlatih dapat menjadi kendala bagi perusahaan asing yang ingin beroperasi dan merupakan tantangan penting bagi penanaman modal asing di Gorontalo. 4) Persaingan dengan daerah lain; Gorontalo jika dibandingkan daerah lain di Sulawesi masih berada di posisi kedua dari terakhir menjadi daerah lain yang lebih maju atau menawarkan insentif lebih menarik bisa menarik perhatian investor asing.

Keywords: PMA, Determinansi, Makroekonomi, PMPTSP, Gorontalo

PENDAHULUAN

Salah satu kriteria pembangunan nasional yaitu pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan output komoditas suatu masyarakat melalui kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan warganya, (Kurniawati & Islami, 2022). Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki peran penting bagi pertumbuhan perekonomian dan perkembangan banyak negara. PMA dapat memberikan modal dan sarana untuk mengejar tujuan strategis global, dan sarana untuk mengakses teknologi serta potensial daerah yang dituju untuk menerima PMA. Penelitian yang dilakukan oleh Changwatchai mengenai volatilitas PMA, ditemukan hubungan yang berbeda karena ukuran PMA dalam industri dan volatilitas PMA di antara tiga kasus. Untuk Uni Eropa dan Jepang, volatilitas PMA pertama akan meningkat dan kemudian menurun, sesuai dengan ukuran PMA. Sama halnya dengan Amerika Serikat yang mengalami fluktuasi dengan ukuran PMA yang lebih besar, volatilitas akan naik lalu turun, dan kemudian naik lagi (Changwatchai, 2010). Volatilitas adalah ukuran statistik dari penyebaran pengembalian untuk keamanan atau indeks pasar dalam periode tertentu. Berdasarkan hasil kajian determinan PMA, sejumlah kebijakan implikasi khusus dan

rekomendasi dapat ditargetkan untuk dipertimbangkan oleh pemerintah negara-negara tersebut. Menurut hasil penelitian tersebut, volume perdagangan bilateral yang tinggi dapat menarik lebih banyak PMA, pemerintah harus mempromosikan perjanjian perdagangan bilateral dengan negara lain dan memfasilitasi produksi PMA melalui arus bebas barang dan jasa, (Changwatchai, 2010).

Adapun dalam penelitiannya Ismail, penelitian yang menggunakan model semi gravitasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu PMA di ASEAN menemukan bahwa selain ukuran pasar dan sumber lainnya seperti jarak yang lebih pendek, umum dalam bahasa, pasar yang diperluas relatif menarik lebih banyak investor asing, (Ismail, 2009). Faktor makroekonomi lainnya seperti tingkat inflasi yang lebih rendah, nilai tukar yang sedikit lebih tinggi dan manajemen yang baik serta anggaran pemerintah adalah salah satu faktor kunci yang menarik lebih banyak PMA. Selain faktor ekonomi pun, faktor sosial seperti telekomunikasi dan infrastruktur yang baik dan faktor-faktor non-ekonomi seperti transparansi dan kebijakan perdagangan juga mendorong lebih banyak investor asing. Investasi dalam perekonomian merupakan motor

penggerak yang dapat memperluas kapasitas produksi dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja. Mengembangkan lapangan kerja secara berkelanjutan menjadi perhatian global karena khususnya ekonomi pembangunan berkembang memainkan peran penting dalam lanskap ekonomi global secara keseluruhan. Ekonomi yang dinamis dan stabil di negara-negara berkembang dapat memiliki efek positif pada perdagangan global, investasi, dan pasar keuangan, (Ismail, 2009).

Peranan investasi dalam perekonomian yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produk, dan penciptaan lapangan kerja. PMA merangsang pertumbuhan ekonomi melalui modal yang dapat diinvestasikan, (Aloui et al., 2024), pun penanaman modal asing dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi melalui berbagai saluran, termasuk pemanfaatan sumber daya lokal, pengenalan teknik manajemen canggih, dukungan untuk akses ke teknologi baru, pembiayaan defisit transaksi berjalan, investasi dalam penelitian dan pengembangan, dan penguatan stok modal manusia dan fisik, (Arbia & Sobhi, 2024). Melalui investasi maka kegiatan ekonomi dapat berkembang dan kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat. Teori pertumbuhan oleh Solow, Romer, dan Lucas menunjukkan bahwa penanaman modal asing memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Di negara berkembang, kinerja ekonomi sangat bergantung kemajuan teknologi yang dibawa oleh perusahaan multinasional, (Kouladom, 2024). Dengan mengundang investor asing (PMA) ke daerah merupakan langkah strategis

sekaligus cukup berat karena menuntut kesiapan semua instansi terkait baik di pusat maupun di daerah. Berbagai jenis investasi menargetkan pasar yang berbeda berdasarkan beragam strategi dan faktor penentu, termasuk infrastruktur yang berbeda. Infrastruktur dan telekomunikasi memainkan peran kunci dalam menarik penanaman modal asing, (Hernández Soto & Martínez-Cobas, 2024).

Teori penanaman modal asing langsung (Foreign Direct Investment) mulai diciptakan oleh (Hymer, 1960) mengenai pentingnya perspektif internal perusahaan dalam mengatasi sifat monopoli negara sasaran investasi. Hymer memadukan teori klasik value of firm dalam pengambilan keputusan investasi di negara lain. Keputusan investasi sepenuhnya didasarkan pada keuntungan maksimum, yang dapat mengarah pada Langkah-langkah untuk mengendalikan sumber daya, mengurangi tingkat persaingan di antara investor asing, dan bahkan kerjasama operasional di antara mereka. Penanaman Modal Asing (PMA) mengacu pada investasi jangka panjang pada perusahaan yang berlokasi di negara lain. Ketika perusahaan multinasional dari suatu negara menanamkan modal jangka panjang pada perusahaan dari negara lain, maka perusahaan di negaranya sendiri dapat mengendalikan perusahaan di negara tujuan untuk jangka waktu yang lama (S. W. Siregar & Endraswati, 2024).

Pertumbuhan ekonomi, yang diukur dengan PDB, adalah salah satu diantara beberapa faktor yang mempengaruhi masuknya investasi asing. Bilgili, Tulus dan Dogan, (2012) menganalisis determinan utama investai asing dengan set data triwulanan Turki untuk periode 1988-2010, dan mencatat koefisien positif dan signifikan secara

statistik pada tingkat pertumbuhan PDB. Dalam hal ini, adanya potensi pertumbuhan pasar menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendukung arus masuk investai asing karena peningkatan pendapatan dan efek konsumsi. Kemudian, temuan empiris dari Erdogan dan Unver (2015) membuktikan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang direalisasikan pada term sebelumnya merupakan faktor penting dalam menarik lebih banyak investasi asing (S. W. Siregar & Endraswati, 2024).

Masalah krusial lain yang dihadapi selama implementasi dan penerapan kebijakan mengenai investasi yakni ketidaklarasan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Ketidaklarasan antara dua kubu adalah karena faktor komunikasi. Faktor komunikasi merupakan hal yang sering dipandang rumit yang sangat potensial untuk terjadinya penyimpangan komunikasi. Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas (pemerintah pusat) ke bawah (pemerintah daerah) maupun dari bawah ke atas. Dalam organisasi publik, pemimpin organisasi atau atasan mestinya mampu mengkomunikasikan kebijakan dan menciptakan kondisi kerja staf atau implementor untuk memiliki kapasitas dan motivasi kerja sebagaimana yang dikehendaki oleh kebijakan publik itu sendiri. Hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus saling bersinergi dengan komunikasi yang baik agar produk kebijakan yang dikeluarkan tidak tumpang tindih dengan peraturan daerah. Komunikasi antara dua aktor ini adalah untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman / diskomunikasi informasi yang disampaikan. Masih adanya ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terutama dalam proses perizinan

dan investasi. Pengusaha maupun investor mengalami kebingungan ketika sudah memperoleh izin dari pemerintah pusat namun terhalang oleh kebijakan di daerah. Beberapa kasus dimana investor sudah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat tapi ketika implementasi di daerah mendapat hambatan. Di daerah ada gubernur dan bupati yang memiliki wewenang dengan perbedaan kepentingan, sehingga berdampak dengan tidak memberikan izin investasi. Inilah salah satu yang masuk paket kebijakan tetapi implementasi di lapangan tidak jalan, (Nurtina, 2024).

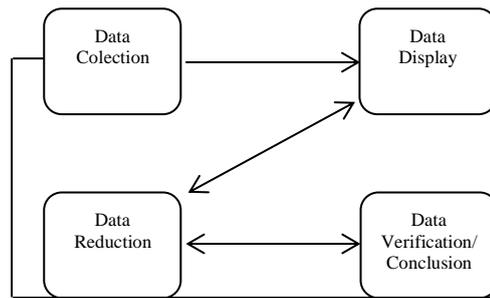
Ketersediaan infrastruktur dan kesiapan sarana prasarana merupakan faktor untuk investor asing berinvestasi di daerah seperti halnya yang di terjadi Provinsi Gorontalo. Provinsi ini merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara yang terbentuk pada Tahun 2000. Provinsi ini memiliki lima kabupaten dan 1 kota (Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo). Untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan di delegasikan kewenangannya dari Gubernur Provinsi Gorontalo ke Kepala Dinas DPMPTSP yang diatur pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 6 Tahun 2023 yang memuat bahwa pendelegasian oleh Gubernur Provinsi Gorontalo kepada Kepala Dinas PMPTSP meliputi wewenang penyelenggaraan pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI; perizinan berusaha Non KBLI; perizinan non berusaha Non KBLI; non perizinan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Gorontalo,

diketahui bahwa sebaran jumlah penanaman modal asing yang ada di daerah Provinsi Gorontalo tidak mengalami peningkatan signifikan dibandingkan daerah Sulawesi lain. Merujuk pada data realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) tahun 2022 menampilkan yaitu Gorontalo berada di posisi 32, bila dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di pulau Sulawesi, Provinsi Gorontalo berada di urutan 4 dari total 6 provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor determinasi yang mempengaruhi penanaman modal asing di Provinsi Gorontalo, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengambil judul penelitian “Analisis Faktor Determinasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Gorontalo”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinansi PMA di Provinsi Gorontalo, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder dan primer, sumber sekunder untuk data kuantitatif yang diperoleh dari Dinas PMPTSP, publikasi BPS, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini dan sumber primer untuk data kualitatif yang diperoleh melalui in-depth interview yang dilakukan pada Dinas PMPTSP dan sumber terkait, (Hadju & Aulia, 2022). In-depth interview adalah proses memperoleh keterangan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden menggunakan panduan wawancara Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Sedangkan, teknik

analisis data menggunakan metode model Miles dan Huberman terdiri yang menyatakan bahwa proses pengumpulan data dilakukan 3 kegiatan penting diantaranya reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), kesimpulan verifikasi (verification) atau penarikan, (Fadli, 2021). Berikut adalah gambar dari proses tersebut:



Gambar 1
Model Miles and Huberman
(1994)

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa proses penelitian ini dilakukan secara berulang terus-menerus dan saling berkaitan satu sama lain baik dari sebelum, saat di lapangan hingga selesainya penelitian. Komponen alur dijelaskan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah proses merangkum atau memilih hal-hal yang pokok, karena data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data berlangsung selama proses pengambilan data itu berlangsung, pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi (bagian-bagian). Proses transformasi ini berlanjut terus sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap.

2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, langkah yang dilakukan peneliti adalah melakukan penyajian data. Penyajian

data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian dapat berbentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori, namun dalam penelitian kualitatif biasanya disajikan dalam sebuah naratif. Penyajian data bertujuan agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dalam merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

3. Kesimpulan; Penarikan atau Verifikasi Langkah terakhir dalam pengumpulan data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses dari awal pendataan, kemudian peneliti melakukan rangkuman atas permasalahan dilapangan, kemudian melakukan pencatatan hingga menarik kesimpulan. Biasanya kesimpulan awal masih bersifat sementara dan bisa saja mengalami perubahan selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Tetapi kesimpulan tersebut dapat menjadi kesimpulan yang kredibel jika didukung oleh data yang valid dan konsisten.

Dalam penelitian ini, data-data yang terkumpul dari informan yaitu Dinas PMPTSP dalam sektor pelaksanaan evaluasi pengembangan iklim, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan, data, dan informasi penanaman modal di wilayah Provinsi Gorontalo telah di catat secara rinci dan teliti. Kemudian hasil pencatatan tersebut sudah dirangkum dan memfokuskan pada hal yang penting sehingga hasil dari reduksi data memberikan gambaran yang jelas untuk mempermudah dalam penarikan kesimpulan. Setelah proses reduksi data, data tersebut dapat disajikan dalam bentuk uraian naratif, bagan, flowchart dan sejenisnya. Data yang telah disajikan dan penjelasan verifikasi data dalam bentuk teks naratif

yang menjelaskan tentang faktor-faktor determinasi yang mempengaruhi Tingkat penanaman modal asing di Provinsi Gorontalo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Perkembangan Investasi Daerah Provinsi Gorontalo

Penanaman modal asing (PMA) merupakan sebuah proses adanya pemindahan modal dari satu negara ke negara lain. Modal yang diterima dari negara lain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Dengan adanya modal asing yang masuk ke negara Indonesia diharapkan dapat meningkatkan output dan mensejahterakan masyarakat. Selain memberikan manfaat berupa kesejahteraan bagi masyarakat, modal asing juga membawa dampak positif lainnya bagi negara tujuan investasi yaitu dapat membawa teknologi yang lebih maju lagi. Penggunaan teknologi yang baru dan produktivitas dan tingkat efisiensi produksi dapat meningkat akibat adanya alat produksi yang baru dan pastinya lebih canggih. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu dari negara asing di negara lain. Ini bisa berupa investasi dalam bentuk uang, aset, atau teknologi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. PMA seringkali melibatkan pembukaan usaha baru, akuisisi perusahaan lokal, atau pengembangan proyek infrastruktur.

Besarnya jumlah investasi adalah faktor yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian suatu daerah, karena jumlah investasi atau penanaman modal yang akan ditanamkan oleh investor dapat membantu kondisi perekonomian daerah menunjukkan kepada kondisi yang kondusif, sehingga kegiatan seluruh sector perekonomian menunjukkan perkembangan yang menggairahkan.

Dengan adanya investasi maka kegiatan produksi pun akan menjadi efektif dan efisien yang pada akhirnya pihak produsen akan dapat memaksimalkan keuntungan dan selanjutnya juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Berikut perkembangan Investasi Daerah Gorontalo dari tahun 2019 – 2023.

Tabel 1
Investasi Asing Di Gorontalo Per Triwulan IV Tahun 2019-2023

Tahun	Total Investasi Asing
2019	436.192.893,9
2020	217.543.710,1
2021	339.994.540,1
2022	242.546.690,1
2023	111.541.560,1

Sumber: Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Tabel 1 memperlihatkan perkembangan investasi daerah Provinsi Gorontalo dari tahun 2019 - 2023. Dilihat dari investasi per triwulan IV bahwa perkembangan investasi cenderung mengalami fluktuasi. Perkembangan investasi tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar RP 436.192.893,9. Hal ini disebabkan karena kegiatan produksi masih berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga para investor masih tertarik untuk berinvestasi karena masih memberikan keuntungan atau pengembalian modal sesuai dengan yang diharapkan. Pada tahun 2019 penanaman modal asing mencapai jumlah yang sangat besar karena iklim usaha mengalami peningkatan sehingga investor luar negeri tidak ragu untuk menanamkan modalnya di provinsi Gorontalo. Sedangkan, perkembangan investasi terendah terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 111.541.560,1. Ini terjadi akibat pada tahun ini modal yang berasal dari luar negeri sangat menurun drastis dari tahun

sebelumnya. Pasca Covid-19 terjadi penurunan investasi di Provinsi Gorontalo. Penanaman modal yang berasal dari luar negeri merupakan kontribusi terbesar pada investasi di Provinsi Gorontalo, sehingga pada saat modal luar negeri tidak memberikan kontribusi jumlah investasi daerah secara otomatis langsung mengalami penurunan pula. Hal ini diduga karena masalah kurs yang membuat para investor tidak bisa memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh. Selain itu, masalah di daerah seperti regulasi, birokrasi, maupun faktor penghambat lainnya, juga dapat menjadi penyebab pihak luar negeri tidak mau menginvestasikan modalnya di provinsi Gorontalo.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap investasi di Provinsi Gorontalo

Pertumbuhan ekonomi merupakan hal penting dalam bidang industri karena tujuan yang diinginkan oleh negara maupun daerah adalah memajukan sektor-sektor ekonominya demi mendapatkan efisiensi pemanfaatan sektor ekonomi secara menyeluruh yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai, hal ini juga diharapkan bisa menciptakan lapangan usaha dan menurunkan tingkat pengangguran sehingga memperoleh kestabilan harga. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai salah satu tolak ukur pembangunan daerah tidak terlepas dari potensi yang dimiliki oleh daerah terutama potensi daerahnya. Perencanaan merupakan kunci bagi proses pembangunan ekonomi yang baik, sehingga penting bagi daerah untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisis potensi ekonomi dan memilih prioritas pada sektor yang sesuai dengan potensi yang ada. Hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengetahui prospek

pembangunan ekonomi daerah, melalui hal ini pembangunan ekonomi daerah yang serasi dan terpadu dikaitkan dengan perencanaan yang efektif dan efisien dapat terlaksana dan diharapkan dapat menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Infrastruktur mempunyai peranan penting dalam pembangunan Nasional. Laju pertumbuhan dan investasi tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur. Dengan adanya perkembangan dan pembangunan infrastruktur diharapkan menjadi pondasi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, (Mahrizza & Amar B, 2019). Pembangunan infrastruktur yang masif dan berkelanjutan dilaksanakan oleh negara maupun daerah dapat menarik investor asing untuk menanamkan modalnya jika infrastrukturnya dapat mendukung proses bisnis usahanya. Investasi yang bersifat penanaman modal langsung yang akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja, sehingga akan berdampak kepada peningkatan nilai output Nasional. Investasi tersebut berasal dari sektor pemerintah maupun dari sektor swasta. Pembangunan perekonomian Nasional tidak terlepas dari investasi yang akan berdampak kepada pembangunan infrastruktur dan berdampak pula kepada pertumbuhan ekonomi Nasional. Untuk mempercepat penyediaan infrastruktur, pemerintah memberikan dukungan dengan kebijakan bentuk kerja sama investasi.

Jika pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya meningkat maka dapat dikatakan pembangunan ekonominya meningkat pula. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang

bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Dilihat dari data pertumbuhan ekonomi yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo dikatakan bertumbuh bangkit dari tahun 2020 saat terjadinya wabah covid-19. Tahun 2021 hingga Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo terus meningkat, data ini dapat dilihat pada grafik berikut,



Gambar 2
Grafik Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Gorontalo 2019-2023

Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dari pengaruh pertumbuhan

PDRB yang signifikan terhadap investasi daerah. Karena pada dasarnya, PDRB mencerminkan kinerja ekonomi suatu daerah, dan peningkatan PDRB biasanya menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Poin pentingnya antara lain:

- a. Daya Tarik Investasi, daerah dengan PDRB yang tinggi cenderung lebih menarik bagi investor, karena menunjukkan potensi pasar yang lebih besar dan stabilitas ekonomi.
- b. Infrastruktur dan Sumber Daya, PDRB meningkat sering kali disertai dengan pengembangan infrastruktur yang lebih baik, yang mendukung kegiatan investasi.
- c. Ketersediaan Tenaga Kerja, pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam PDRB juga dapat meningkatkan ketersediaan tenaga kerja terampil, yang merupakan faktor penting bagi investor.
- d. Kebijakan Pemerintah, PDRB yang tinggi seringkali mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki kebijakan dan regulasi yang mendukung investasi, seperti insentif pajak atau kemudahan izin usaha.
- e. Kepercayaan Investor, PDRB yang stabil dan tumbuh positif dapat meningkatkan kepercayaan investor, baik lokal maupun asing untuk menanamkan modal mereka.

Secara keseluruhan, PDRB berfungsi sebagai indikator penting dalam menilai potensi investasi di suatu daerah, dan pertumbuhan yang berkelanjutan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi. Berdasarkan pada poin-poin yang telah dijabarkan, penulis akan membahasnya satu-persatu.

Daya Tarik Investasi

Provinsi Gorontalo pada Tahun 2023 memiliki total investasi sejumlah Rp. 111.541.559.559,78. Terdaftar beberapa investor asing berbagai negara yang menanamkan investasinya di

Provinsi Gorontalo, diantaranya adalah Amerika Serikat, Singapura, Korea Selatan, Malaysia, Hongkong, Tiongkok, Jerman, Kepulauan Virgin, Turki, Jepang, Belanda, dan Inggris. Provinsi Gorontalo memiliki beberapa daya tarik untuk investasi, antaranya: 1) sumber daya alam, Provinsi Gorontalo kaya akan sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, dan mineral, yang menawarkan potensi bisnis yang besar; 2) kawasan strategis, lokasinya yang strategis di Sulawesi membuat Provinsi Gorontalo menjadi pintu gerbang antara Indonesia Timur dan Barat; 3) pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan infrastruktur, termasuk jalan, pelabuhan, dan bandara, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 4) sektor pariwisata, keindahan alam dan budaya lokal menjadikan Provinsi Gorontalo menarik untuk sektor pariwisata, dengan potensi pengembangan destinasi wisata; 5) komunitas yang mendukung, masyarakat Provinsi Gorontalo dikenal ramah dan bersedia untuk berkolaborasi dengan investor, menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.

Infrastruktur dan Sumber Daya

Sektor utama tujuan investor asing tersebar pada sektor Primer, Sekunder, dan Tersier. Data tersebut diperoleh dari data sekunder yang diberikan oleh pihak PTSP. Berdasarkan hasil wawancara bersama, dikatakan bahwa Provinsi Gorontalo mulai menjadi Provinsi yang dilirik investor asing, hal ini didukung dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan yang dapat memudahkan proses distribusi. Proyek strategis pengembangan infrastruktur di Provinsi Gorontalo yaitu pembangunan 2 jembatan penghubung dan 1 semi terowongan di Gorontalo Outer Ring Road (GORR), tujuan pembangunan ini yaitu untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas di Provinsi Gorontalo.

Tenaga Kerja

Pada Tahun 2023, jumlah penduduk Provinsi Gorontalo usia 15 Tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja sebanyak 651.425 jiwa dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 70,79 persen. Jumlah angkatan kerja ini tersebar di lima kabupaten dan 1 kota yang ada di Provinsi Gorontalo, jumlah terbanyak angkatan kerjanya berada di Kabupaten Gorontalo yaitu sejumlah 225.503 orang. Berdasarkan data dari PTSP pada Tahun 2023 Triwulan IV, jumlah lokasi investor asing paling banyak berada di Kab. Gorontalo, sejumlah 15 lokasi.

Kebijakan Pemerintah

Dalam upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif di Provinsi Gorontalo, telah diterbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang kemudahan investasi. Perda ini mengatur tentang berbagai kemudahan pelayanan terhadap investor terutama untuk masalah penyediaan lahan, proses perizinan dan pemberian insentif berupa keringanan pajak. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah menyusun Standar Operasional Prosedur untuk berbagai kegiatan pelayanan termasuk pelayanan perijinan sehingga Pemerintah Provinsi Gorontalo menjamin kepastian hukum, dan menghilangkan keragu-raguan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya. Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, begitu halnya yang terkait dengan perizinan usaha. Proses perizinan, khususnya perizinan usaha secara langsung berpengaruh terhadap keinginan dan keputusan calon pengusaha atau investor untuk menanamkan modalnya. Peningkatan kualitas pelayanan menyangkut berbagai aspek yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sistem dan prosedur pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan serta SDM

pelayanan.

Kepercayaan Investor

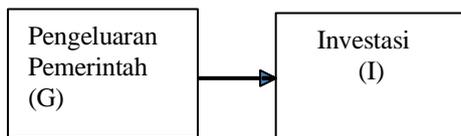
Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, faktor keamanan dan ketertiban adalah hal yang penting. Untuk menjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat, Provinsi Gorontalo telah diperkuat oleh aparat keamanan yang terdiri dari aparat TNI dan POLRI serta Sarpol PP. Adapun peraturan yang diterbitkan untuk kemudahan pengurusan perizinan usaha oleh investor asing masyarakat akan dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik karena semua proses pelayanan di laksanakan dalam satu tempat, serta memberikan keamanan dan kepastian berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Investasi di Provinsi Gorontalo

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan investasi di Indonesia adalah mengambil kebijakan fiskal ekspansif. Menurut J.M Keynes Kebijakan fiskal yang ekspansif dinilai dapat mendorong investasi melalui peningkatan Agregat Demand (permintaan Agregat). Keynes berpendapat peningkatan permintaan agregat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan investasi dan selanjutnya akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Keynes hal ini dikarenakan dengan adanya kebijakan fiskal ekspansif dari pemerintah akan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat maka akan meningkatkan jumlah permintaan yang pada akhirnya mendorong peningkatan produksi. Kebijakan fiskal ekspansif ditandai dengan peningkatan pengeluaran pemerintah. Salah satu tujuan peningkatan pengeluaran

pemerintah ini adalah untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah, tentu anggaran untuk membuat sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan investasi bisa lebih besar, (E. S. Siregar, 2016).

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrument dari kebijakan fiskal dan unsur permintaan agregat. Pengeluaran pemerintah adalah seluruh pembelian atau pembayaran barang dan jasa untuk kepentingan nasional. Pengeluaran pemerintah juga merupakan instrumen pengukur dimana pemerintah menentukan seberapa besar peran sektor pemerintah dan sektor swasta. Di samping itu, pengeluaran pemerintah dapat menjadi penentu pokok jumlah pengeluaran agregat, dan penentu pertumbuhan GNP riil jangka pendek. Pembelian pemerintah adalah barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah pusat, Negara bagian, dan daerah. Kelompok ini meliputi peralatan militer, jalan layang, dan jasa yang diberikan pegawai pemerintah, (Setiawan, 2018).



Pengeluaran pemerintah adalah jumlah barang dan jasa yang disediakan pemerintah, seperti pembangunan jalan raya, jembatan, halte, pembangunan infrastruktur seperti pasar, dan lain sebagainya. Penyediaan barang-barang publik tersebut dilakukan untuk menunjang lancarnya kegiatan perekonomian dan pada akhirnya akan berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi jumlah investasi. Dimana pada saat pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan, hal ini akan diikuti oleh kenaikan permintaan agregat, maka dengan naiknya

permintaan agregat maka akan terjadi pula kenaikan pada pendapatan. Begitu pula dengan investasi, pada saat pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan maka akan terjadi kenaikan terhadap permintaan agregat dan hal ini akan mendorong pihak pengusaha untuk melakukan peningkatan produksi sehingga dengan terciptanya iklim usaha yang baik. Hal ini juga akan meningkatkan jumlah investasi baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, (Setiawan, 2018). Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo, maka dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.
Data Realisasi Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

No	Tahun	Total Investasi Asing	Pengeluaran Pemerintah (Milyar RP)	Pertumbuhan ekonomi (Persentase)
1	2019	436.192.893,9	8.725,13	6.40%
2	2020	217.543.710,1	8.247,78	-0.02%
3	2021	339.994.540,1	8.680,32	2.40%
4	2022	242.546.690,1	8.903,58	4.04%
5	2023	111.541.560,1	9.208,25	4.50%

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Gorontalo

Pada tabel 2 di atas terlihat bahwa realisasi investasi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 bahwa data menunjukan flukttuaif baik dari investasi, pengeluaran pemerintah, maupun pertumbuhan ekonomi. Pada tabel tersebut terlihat bahwa pengeluaran pemerintah pada tahun 2019 mengalami peningkatan, sedangkan ditahun 2023 pengeluaran pemerintah sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dan selanjutnya pengeluaran pemerintah kembali meningkat pada tahun 2022. Data realisasi pengeluaran pemerintah yang kami sajikan disini adalah pengeluaran

pemerintah yang berupa belanja langsung, karena belanja langsung merupakan pengeluaran yang lebih menekankan aspek efisiensi dan efektifitas dalam penggunaannya. Semakin tingginya pengeluaran yang dilakukan pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mensejahterakan rakyatnya dan untuk melakukan pembangunan agar kondisi perekonomian Provinsi Gorontalo semakin meningkat. Sementara itu pada tabel juga terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi dari tahun 2020 mengalami penurunan, dan peningkatan tertinggi adalah pada tahun 2019 yaitu sebesar 6,40 % akan tetapi pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo kembali melemah pada tahun 2021. Dari hasil tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa pada saat investasi mengalami pertumbuhan yang tinggi, tidak langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan begitu pula sama dengan pengeluaran pemerintah yang ketika mengalami peningkatan ternyata tidak secara langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi, begitu pula sebaliknya ketika investasi dan pengeluaran pemerintah menurun tidak langsung mengakibatkan kondisi pertumbuhan ekonomi melemah.

Provinsi Gorontalo Belum Menjadi Tujuan dari Investor Asing

Sebelumnya sudah dijabarkan mengenai poin penting dalam pertumbuhan PDRB yang signifikan terhadap investasi daerah. PDRB berfungsi sebagai indikator dalam menilai potensi investasi di suatu daerah untuk pertumbuhan yang berkelanjutan sehingga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi. Namun, beberapa hal yang telah dilakukan pemerintah daerah dan berbagai potensi investasi yang ada, belum bisa menjadikan Gorontalo menjadi tujuan utama investor melakukan investasi

dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi. Hal ini bisa dilihat dari tabel Badan Pusat Statistik berikut:

Tabel 3
Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri menurut Provinsi (juta US\$)

38 Provinsi	Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri menurut Provinsi (juta US\$)					
	Proyek			Investasi		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Sulawesi Utara	118,0	151,0	277,0	169,1	105,1	203,7
Sulawesi Tengah	169,0	216,0	397,0	2.718,1	7.486,0	7.244,1
Sulawesi Selatan	247,0	275,0	515,0	310,0	469,0	336,7
Sulawesi Tenggara	75,0	102,0	207,0	1.616,5	877,9	448,3
Gorontalo	33,0	30,0	57,0	78,0	102,9	33,8
Sulawesi Barat	27,0	19,0	45,0	5,9	28,3	24,3

Sumber: Badan Pusat Statistik Gorontalo 2023

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Provinsi Gorontalo berada di posisi kelima untuk wilayah Sulawesi. Dari hasil wawancara dengan pihak Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo, bahwa terdapat beberapa faktor penghambat investor untuk melakukan investasi di Gorontalo. Hal ini merupakan tantangan dari pemerintah daerah itu sendiri.

Infrastruktur yang Tidak Memadai

Keterbatasan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, transportasi, dan fasilitas pendukung lainnya yang dimiliki oleh suatu daerah dapat menghambat investasi. Perbaikan infrastruktur menjadi prioritas yang penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan di Gorontalo untuk meningkatkan penanaman modal asing (PMA). Infrastruktur yang tidak memadai menjadi salah satu faktor utama yang menghambat penanaman modal asing di Gorontalo.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas PMPTPSP menyatakan

bahwa akses jalan belum sepenuhnya memadai di seluruh Provinsi Gorontalo. Hal ini bisa dilihat dari kualitas jalan yang rusak atau tidak cukup lebar, tidak tersedia jalur khusus untuk mobilitas kendaraan berat dan besar, sehingga mengakibatkan kemacetan dapat mengganggu distribusi barang dan tenaga kerja. Hal ini membuat biaya logistik meningkat dan mengurangi daya saing. Di Gorontalo juga memiliki keterbatasan transportasi publik yang efektif bisa menyulitkan mobilitas karyawan dan mengurangi akses ke lokasi investasi. Hal ini bisa dilihat bahwa tidak tersedia mobil angkutan umum seperti Mikrolet yang beroperasi di tengah kota. Belum lagi, fasilitas energi yakni pasokan listrik tidak cukup stabil atau terbatas dapat menghambat operasional perusahaan, terutama yang membutuhkan energi tinggi. Selain itu, jaringan telekomunikasi yang masih lemah dan belum semua menjangkau daerah terpencil di Gorontalo, sehingga dapat menghambat komunikasi dan pengelolaan bisnis secara efisien. Ditambah lagi, keterbatasan fasilitas seperti gudang, pusat distribusi, dan area industri dapat menjadi kendala dalam pengembangan usaha. Terakhir yaitu akses ke pelabuhan atau bandara terbatas, maka import dan export barang akan terhambat, yang dapat menurunkan daya tarik investasi, (Hasil Wawancara Bersama Kadis PMPTSP).

Regulasi dan Kebijakan yang Rumit

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, begitu halnya yang terkait dengan perizinan usaha. Proses perizinan, khususnya perizinan usaha secara langsung berpengaruh terhadap keinginan dan keputusan calon pengusaha atau investor untuk menanamkan modalnya. Peningkatan kualitas pelayanan menyangkut berbagai aspek meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sistem dan prosedur pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan serta SDM pelayanan, (Kadariah, 2019).

Dalam rangka peningkatan investasi, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperbaiki mekanisme pelayanan perizinan, dengan memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan kepastian hukum bagi para investor. Guna menjamin kepastian tersebut, maka diperlukan standar pelayanan sebagai acuan bagi seluruh komponen yang terkait dalam pelayanan di Bidang Perizinan. Salah satunya implementasinya adalah dengan membentuk model Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui penerbitan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan adanya peraturan ini masyarakat akan dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik karena semua proses pelayanan di laksanakan dalam satu tempat, serta memberikan keamanan dan kepastian berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, (Kadariah, 2019).

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah sudah cukup baik, namun pada implementasinya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu menyatakan bahwa proses perizinan memakan waktu yang panjang dan kompleks, sehingga sering kali membuat investor asing ragu untuk berinvestasi. Perda hanya pada pemberian izin saja tapi yang memiliki kewenangan kebijakan penuh adalah Kementerian pusat yaitu Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kementerian ini bertugas untuk mengembangkan dan mengatur kebijakan investasi, memfasilitasi investasi baik domestik maupun asing, serta memberikan pelayanan perizinan dan dukungan kepada para investor. Kementerian Investasi juga berfokus pada

peningkatan iklim investasi di Indonesia dan menarik lebih banyak modal untuk pembangunan ekonomi, (Hasil Wawancara Bersama Kadis PMPTSP).

Regulasi dan kebijakan yang rumit dapat menjadi hambatan signifikan bagi penanaman modal asing di Gorontalo. Tidak hanya itu, birokrasi yang dinilai cukup kompleks karena banyaknya instansi yang terlibat dalam proses pengajuan izin bisa menyebabkan kebingungan dan keterlambatan. Di tambah lagi dengan banyaknya persyaratan administratif yang harus dipenuhi dapat menjadi beban bagi investor, terutama bagi yang baru memasuki pasar. Ketidakjelasan hukum juga menjadi penyebab investor berpikir ulang untuk berinvestasi. Kurangnya kepastian hukum dalam regulasi dapat membuat investor ragu untuk berkomitmen pada investasi jangka panjang. Selain itu kepatuhan akan pajak juga rumit dikarenakan kebijakan perpajakan Indonesia hingga daerah yang kompleks dan beragam juga dapat menjadi penghalang, terutama jika tidak ada transparansi. Kepala Dinas PMPTSP juga menambahkan bahwa ada ketentuan lain jika ingin masuk membeli saham salah satu perusahaan yang ada di Gorontalo atau ingin mendirikan perusahaan sendiri, para pemodal harus memiliki modal awal 10 milyar diluar tanah dan bangunan. Hal ini tentu menjadi pertimbangan investor apalagi investor pemula, (Hasil Wawancara Bersama Kadis PMPTSP).

Sumber Daya Manusia

Kurangnya tenaga kerja yang terampil dan terlatih dapat menjadi kendala bagi perusahaan asing yang ingin beroperasi. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan terlatih merupakan tantangan penting bagi penanaman modal asing di Gorontalo. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan; pertama keterampilan yang kurang sesuai, banyak tenaga kerja yang belum bahkan tidak memiliki keterampilan atau keahlian yang dibutuhkan oleh industri tertentu, membuat perusahaan

kesulitan dalam merekrut karyawan yang tepat. Kedua, tingkat pendidikan yang belum sepenuhnya memadai. Hal ini bisa dilihat dari kualitas pendidikan di daerah belum sepenuhnya memadai untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, terutama untuk sektor-sektor yang memerlukan keahlian khusus. Ketiga, kurangnya program pelatihan dan pengembangan yang terfokus dapat mengakibatkan minimnya peningkatan keterampilan tenaga kerja. Keempat, banyak tenaga kerja terampil memilih untuk pindah ke daerah lain atau ke luar negeri untuk kehidupan yang lebih baik, sehingga meninggalkan kekurangan di pasar lokal. Kelima, kesadaran Masyarakat akan peluang kerjayang tersedia masih kurang sehingga potensi SDM yang ada tidak terpakai secara optimal, (Hasil Wawancara Bersama Kadis PMPTSP).

Selain itu, masalah lain yang muncul adalah kurangnya komitmen jangka panjang oleh para pencari kerja. Di sisi lain, investor asing sering kali mencari tenaga kerja yang bisa bertahan dalam jangka panjang, sehingga ketidakpastian di pasar kerja lokal bisa menjadi penghalang. Terakhir adalah perbedaan budaya kerja di daerah Gorontalo tentu berbeda dengan budaya kerja di negara asal investor. Perbedaan dalam budaya kerja antara investor asing dan tenaga kerja lokal dapat menyebabkan ketidakcocokan dalam manajemen dan operasional. Contoh yang paling sering ditemui adalah tenaga kerja lokal masih kurang disiplin dan cenderung banyak membuang waktu, tentu hal seperti ini menyebabkan investor berpikir ulang. Untuk menarik lebih banyak investasi asing, perlu ada upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat program pelatihan, dan menciptakan kesadaran tentang pentingnya pengembangan SDM di Gorontalo, (Hasil Wawancara Bersama Kadis PMPTSP).

Persaingan dari Daerah Lain

Kepala dinas PMPTSP Gorontalo menyatakan jika dibandingkan daerah lain di

Sulawesi masih berada di posisi kedua dari terakhir menjadi daerah lain yang lebih maju atau menawarkan insentif lebih menarik bisa menarik perhatian investor asing. Persaingan dari daerah lain merupakan faktor yang signifikan dalam menghambat penanaman modal asing di Gorontalo. Beberapa jenis penawaran yang masing-masing daerah berikan. Pertama, daerah lain mungkin menawarkan insentif investasi yang lebih menarik, seperti kemudahan perizinan atau subsidi, dan pengurangan pajak yang dapat menarik minat investor. Kedua, daerah mana yang lebih baik infrastrukturnya. Daerah dengan infrastruktur yang lebih maju dapat memberikan kemudahan operasional yang lebih baik bagi investor, sehingga mereka cenderung memilih lokasi tersebut. Ketiga, dalam hal kualitas sumber daya manusia. Jika daerah lain memiliki tenaga kerja yang lebih terampil dan terlatih, investor mungkin lebih memilih untuk berinvestasi di sana. Selanjutnya, daerah yang lebih aktif dalam mempromosikan keunggulan mereka kepada investor bisa lebih berhasil dalam menarik perhatian. Oleh karena itu, untuk bersaing dengan daerah lain, Gorontalo perlu mengidentifikasi keunggulan unik atau keunggulan komparatif yang dimilikinya dan melakukan upaya terfokus untuk meningkatkan daya tarik investasi, baik melalui pengembangan infrastruktur, kebijakan yang mendukung, maupun penguatan SDM, (Hasil Wawancara Bersama Kadis PMPTSP).

SIMPULAN

PDRB berfungsi sebagai indikator penting dalam menilai potensi investasi di suatu daerah, dan pertumbuhan yang berkelanjutan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi. Pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan maka akan terjadi kenaikan juga terhadap investasi asing, hal ini akan mendorong pihak pengusaha untuk melakukan peningkatan produksi

sehingga dengan terciptanya iklim usaha yang baik. Provinsi Gorontalo berada di posisi ke 5 untuk daerah tujuan investasi, meskipun pemerintah sudah melakukan beberapa langkah-langkah strategis untuk meningkatkan investasi asing, namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa tantangan maupun masalah. Hal ini diakibatkan beberapa faktor yakni infrastruktur yang belum memadai, regulasi dan kebijakan yang rumit, sumber daya manusia Gorontalo yang masih terbatas, dan adanya persaingan dari daerah lain.

Agar Provinsi Gorontalo bisa menjadi daerah tujuan investor memerlukan upaya untuk menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan transparansi, dan menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi investor asing. Membangun pemahaman yang lebih baik antara budaya lokal dan praktik bisnis asing dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mendukung penanaman modal asing di Gorontalo. Oleh karena itu, faktor-faktor ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Aloui, Z., Hamdaoui, M., & Maktouf, S. (2024). Does governance matter to ensure significant effect of foreign direct investment on poverty reduction? Evidence from developing and emerging countries. *Transnational Corporations Review*, 16(2), 200058. <https://doi.org/10.1016/j.tncr.2024.200058>
- Arbia, A., & Sobhi, K. (2024). Foreign direct investment, information and communication technology, and economic growth: The case of North African Countries. *Scientific*

- African*, 24(May), e02234.
<https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2024.e02234>
- Changwatchai, P. (2010). The Determinants of FDI Inflows by Industry to ASEAN. *Disertasi*, August, 96–175.
- Hadju, V. A., & Aulia, U. (2022). *DESAIN PENELITIAN MIXED METHOD* Editor: Nanda Saputra (Issue November).
- Hernández Soto, G., & Martinez-Cobas, X. (2024). The impact of transportation investment, road transportation and telecommunications on FDI in Latin America 2008-2021. *Transport Economics and Management*, 2(February), 45–57.
<https://doi.org/10.1016/j.team.2024.01.002>
- Ismail, N. W. (2009). The determinant of foreign direct investment in ASEAN: A semi-gravity approach. *Transition Studies Review*, 16(3), 710–722.
<https://doi.org/10.1007/s11300-009-0103-0>
- Kadariyah, R. (2019). Kajian Fiskal Regional. *Kanwil Ditjen Perbendaharaan Riau*, 1–25.
- Kouladoum, J. C. (2024). The role of institutional quality on the impact of Chinese foreign direct investments and human capital development on macroeconomic performance in the CEMAC zone. *Transnational Corporations Review*, 16(2), 200052.
<https://doi.org/10.1016/j.tncr.2024.200052>
- Kurniawati, D. L., & Islami, F. S. (2022). Analisis Pengaruh PMA, PMDN dan Ekspor Migas- Nonmigas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(1), 13–28.
<https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i1.98>
- Mahriza, T., & Amar B, S. (2019). Pengaruh Investasi Dalam Negeri, Investasi Asing, Tenaga Kerja Dan Infrastruktur Terhadap Perekonomian Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 691.
<https://doi.org/10.24036/jkep.v1i3.7697>
- Muhammad Rijal Fadli (Universitas Negeri Yogyakarta, I. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, ISSN: 1412-1271 (p); 2579-4248 (e), Vol. 21., No. 1, 21(1), 33–54.
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Nurtina, S. (2024). *THE POLEMIC OF PUBLIC POLICY IMPLEMENTATION IN*. II(1), 1–18.
- Setiawan, H. (2018). Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Kinerja Makroekonomi Di Indonesia Dengan Model Structural Vector Autoregression (Svar). *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 3(2), 95–109.
<https://doi.org/10.20473/jiet.v3i2.9169>
- Siregar, E. S. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Investasi Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Education and Development STKIP Tapanuli Selatan*, 2(2), 1–6.
- Siregar, S. W., & Endraswati, H. (2024). Determinan Foreign Direct Investment Di Negara D-8 Dengan Pendekatan Model Ardl. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 29(1), 1–17.
<https://doi.org/10.35760/eb.2024.v29i1.8585>